

## ABSTRAK

Peneliti memilih RSUD Kardinah yang berada di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena pada tahun 2017 terjadi kasus korupsi di RSUD Kardinah. Hal ini yang membuat peneliti tertarik apa sebenarnya yang terjadi di dalam pemerintahan di Kota Tegal yang dihubungkan dengan Peran Legislatif. Karena pada dasarnya Legislatif mempunyai peran yang bersinggungan langsung dengan pemerintah guna menghindari terjadinya kasus korupsi yang terjadi di Kota Tegal. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana peran legislatif dalam penerapan prinsip *good governance* di pemerintahan Kota Tegal, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bagaimana cara mengelola pemerintahan yang baik, atau masih ada yang belum dijalankan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari perwakilan keempat pilar, yaitu: DPRD Kota Tegal, Sekretariat DPRD Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal, dan Masyarakat Kota Tegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran legislatif yang dilakukan kepada pemerintah Kota Tegal sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat terlihat dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan oleh DPRD Kota Tegal. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yang telah diterapkan antara lain : (1) Efektif dan Efisien dimana dalam prinsip ini sudah berjalan dengan baik sesuai hasil dengan laporan LKPJ Wali Kota terkait bidang kesehatan. (2) Akuntabilitas, dalam prinsip DPRD menjaga prinsip tersebut dimana realisasi anggaran RSUD Kardinah mencatatkan hasil yang positif dimana anggaran yang didapat oleh RSUD Kardinah dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Tegal. (3) Partisipasi Masyarakat, hal ini yang telah dijalankan oleh DPRD guna menjangkau aspirasi masyarakat baik melalui *reses*, *public hearing*, ataupun acara tatap muka lainnya yang berkaitan dengan pembangunan Kota Tegal ke depannya. (4) Daya Tanggap, dalam prinsip ini DPRD Kota Tegal memiliki respon yang cepat kepada pemerintah maupun masyarakat hal ini bertujuan menghindari permasalahan yang semakin banyak apabila tidak diselesaikan secara cepat. (5) Visi Strategis, dalam prinsip ini baik DPRD Kota Tegal maupun Pemerintah telah memiliki visi strategis dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bertujuan untuk membangun Kota Tegal.

Peneliti memberikan rekomendasi untuk DPRD dan Pemerintah di Kota Tegal untuk lebih menerapkan prinsip transparansi agar masyarakat Kota Tegal dapat mengawal bersama-sama anggaran yang digunakan di Kota Tegal, hal ini juga nantinya untuk menghindari kasus korupsi di Kota Tegal kembali terulang lagi seperti pada tahun sebelumnya.

**Kata Kunci:** Peran Legislatif, *Good Governance*, Kota Tegal